

ANALISA
INTA



ANALISA

BERAS & KOPRA

TAHUN IV NO. 8

AGUSTUS 1975



PENGANTAR PENERBIT

Penerbitan ANALISA bulan Agustus 1975 kali ini memusatkan perhatian kepada pembahasan di sekitar permasalahan dua komoditi pokok, yaitu Beras dan Kopra, dengan pengetahuan tulisan Djisman S. SEMANDJUNTAK berjudul "PUSAT KOPRA BAGI PETANI KOPRA" dan tulisan R. HARYOSEPUTRO berjudul "MENUJU PEMENUHAN KEBUTUHAN BERAS SENDIRI".

Tulisan pertama didasarkan atas peninjauan dan penelitian langsung penulis ke daerah Sulawesi Utara dan Tengah pada bulan Juli 1975, ditunjang oleh data-data terbuka serta bahan pustaka lain yang ada. Dipaparkan di situ beberapa kesulitan yang dihadapi petani kopra, baik yang disebabkan oleh faktor ekstern, seperti perubahan harga di pasaran internasional maupun nasional, pengaruh alam, sistem perkreditan, kebijakan serta peranan lembaga pemerintah di bidang kopra yang masih belum menguntungkan petani kopra; maupun faktor intern, seperti sikap mental petani yang umumnya masih mempunyai kecenderungan bersifat konsumtif dalam mempergunakan hasil panennya ataupun tingkat kesadaran serta pendidikannya.

Penulis mengajukan sebuah gagasan pendirian "Pusat Kopra" yang diatur berdasarkan sistem koperasi, dilola oleh dan untuk memenuhi kepentingan si petani dan bukan kepentingan pemerintah, di samping beberapa gagasan lain di bidang kebijakan ataupun pelaksanaan. Kesemuanya itu ditujukan kepada usaha perlindungan produksi kopra, yang akhir-akhir ini menunjukkan kecenderungan menurun sehingga dikhawatirkan tidak akan dapat lagi memenuhi kebutuhan domestik, maupun perlindungan atas nasib petani kopra sesuai dengan prinsip bahwa "Pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya".

Kalau tulisan mengenai kopra bernada penuh khawatiran, maka tulisan R. HARYOSEPUTRO bernada penuh harapan berkenaan dengan pengadaan beras di masa mendatang. Namun hendaklah disadari bahwa harapan tersebut tidaklah merupakan hal yang dengan sendirinya akan terjadi, tetapi memerlukan persyaratan-persyaratan yang mutlak untuk dipenuhi sebelumnya. Di sinilah letak permasalahannya!

Dengan membaca kedua tulisan tersebut sedikit banyaknya diharapkan bahwa permasalahan yang sangat serius dan kompleks di solitar pengadaan dan penyaluran bahan-bahan komoditi, khususnya beras dan kopra, dapat lebih dipahami dan disadari. Karena kemampuan memahami dan menyadari itu sendiri pada hakikatnya sudah merupakan setengah jawaban dari permasalahan yang ada! Untuk itu diperlukan adanya kepekaan dan kewaspadaan, karena hanya dengan cara itulah ketepatan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang perekonomian, akan senantiasa dapat ditingkatkan.

Agustus 1975

C.S.I.S.

DAFTAR ISI

Hal.

Pengantar Penerbit

1

Pusat Kopra Bagi Petani Kopra

Djisman S. SIMANDJUNTAK

2

Menuju Pemenuhan Kebutuhan Beras Sendiri

R. HARYOSEPUTRO

29



Diterbitkan oleh

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat

PUSAT KOPRA BAGI PECANTIK KOPRA

Djisman S. SIDANDJUNTAK

I. Pengantar

Sebagai kegiatan ekonomi yang bersifat agraris, pengusahaan kopra terikat oleh beberapa risiko, baik yang bersifat alamiah maupun kecenderungan ekonomi di tingkat nasional dan internasional. Risiko tersebut tidak selamanya bersifat merugikan bagi petani, sebab adakalanya, resultante dari variabel-variabel tersebut menimbulkan kenaikan harga yang progresif dibandingkan dengan kecenderungan faktor lain seperti biaya hidup dan turunnya produksi pada musim kering.

Akan tetapi pengalaman telah menunjukkan bahwa keuntungan yang demikian umumnya adalah bersifat sementara, yang diikuti oleh kecenderungan merugikan, yang juga adakalanya bahkan menjadi lebih buruk dari keadaan sebelum masa sementara yang menguntungkan tadi. Petani Indonesia kiranya telah banyak mengalami kenyataan semacam ini, terutama para petani yang produksinya ditujukan untuk ekspor, seperti petani karet, kemenyan, nilam dan kopra. Apabila dalam suatu periode mereka dapat menikmati kenaikan harga, maka pada waktu yang sama sebenarnya mereka telah berada pada kedudukan yang goyah karena dimulainya proses substitusi baik antara bahan alam itu sendiri maupun bahan sintetis. Tambahan pula, petani yang demikian umumnya adalah monokultur dan oleh karena itu kesukaran yang terjadi atas produksi tunggal tersebut dapat juga berarti kesukaran bagi hidup petani.

Akibat yang mungkin timbul tidak saja akan dirasakan oleh petani yang kelirangan daya beli tersebut, tapi juga pada radius yang lebih luas melalui gangguan-gangguan yang dapat timbul dalam kehidupan sosial, politik dan pertahanan keamanan, yang secara keseluruhan mempengaruhi ketahanan nasional. Dalam hubungan ini penelitian kami lakukan pada komoditi kopra dengan menggunakan informasi yang dapat kami kumpulkan dari para petani dan lembaga yang mengurusinya di Sulawesi Utara dan Tengah ditambah dengan penelitian atas kepustakaan tertentu.

Penelitian kami diarahkan pada kemungkinan stabilisasi pendapatan petani dengan suatu anggapan bahwa stabilisasi lebih bermanfaat karena:

- petani itu sendiri umumnya tidak menghendaki fluktuasi, sebagaimana tergambar dalam reaksi mereka atas harga-harga. Dengan perkataan lain, pendapatan riil yang stabil adalah lebih dikehendaki daripada pendapatan yang terkadang naik terkadang turun.
- petani juga belum memiliki "income management capability" yang baik, sehingga pada saat pendapatan riilnya naik ia belum memikirkan periode di mana pendapatan riilnya mungkin turun.

Untuk dapat menjangkau tema pokok tersebut di atas, penelitian ini kami bagi dalam 5 bagian yaitu: Uraian historis dari kondisi yang ada sekarang; Beberapa masalah pokok; Kemungkinan Stabilisasi pendapatan petani; Pusat Kopra dan diakhiri dengan Penutup.

II. Sejarah Kesukaran yang sedang berlangsung sekarang

Harga kopra di daerah produsen dewasa ini yang dapat dikatakan amat rendah, sebenarnya adalah bermula dari musim kering yang berlangsung lama sejak awal tahun 1972. Pengaruhnya amat besar atas produksi tahun 1972, 1973 dan menjelang akhir tahun 1974, dan karena musim kering tersebut juga terjadi di negara penghasil kopra lainnya, Filipina, Sri Lanka dan India, maka penawaran kopra di pasar dunia turun dengan volume yang besar.

Volume ekspor kopra dan minyak kelapa Filipina, dihitung atas dasar volume ekspor tahun 1970 (dengan indeks = 100) turun dari 142 pada tahun 1972 menjadi 126 pada tahun 1973, sedang volume ekspor Sri Lanka dalam periode yang sama turun dari 143 menjadi 54.¹ Ekspor kopra Indonesia pada tahun 1973 hanya meliputi 65.000 ton, bahkan sejak bulan Agustus telah dikeluarkan peraturan tentang larangan ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Akibatnya harga kopra di pasar dunia

¹ International Financial Statistics, IMF, Vol. XXVIII Number 3, Maret 1975

meningkat dengan tajam dari US\$ 140/long tons pada bulan Desember 1972 menjadi 600 dollar pada bulan Desember 1973 (329% di atas harga tahun 1972), bahkan menjadi US\$ 850 pada bulan Februari 1974 atau 507% di atas harga bulan Desember 1972.¹

Dengan volume dan harga ekspor yang demikian kiranya dapat dimengerti bahwa effek substitusi akan bekerja dengan cepat; pertama karena industri yang menggunakan bahan kopra tidak akan mau berdiam diri apabila komoditi kopra tidak dapat diperoleh di pasar dunia dalam jumlah yang cukup; sedang kedua, karena tingkat harga yang tinggi tersebut pada dasarnya dapat dihindari karena tersedianya produk substitusi seperti biji sawit yang hanya mencapai harga tertinggi US\$ 715 per long tons c.i.f. London, itupun hanya dalam bulan Maret sampai Juni 1974.² Itulah mungkin beberapa penyebab yang mendorong volume ekspor kelapa dan minyak sawit Indonesia terus meningkat selama periode tersebut.

Volume minyak sawit saja telah meningkat dari 236.500 ton pada tahun 1972 menjadi 262.700 ton pada tahun 1973 dan 281.200 ton pada tahun 1974.³ Dan ternyata harga ekspor minyak sawit mempunyai hubungan positif dengan harga kopra dan apabila dihitung berdasarkan harga-harga tahun 1974, di antara harga kopra dan harga biji sawit terdapat koefisien determinasi 26,01% atau dengan perkataan lain 26,01% dari perubahan harga biji sawit adalah karena perubahan harga kopra.

Kenyataan di Indonesia kiranya menjadi lebih rumit, karena di samping harus memperhitungkan fluktuasi harga di pasar dunia, produksi kopra Indonesia selama masa sukar tersebut telah turun sedemikian rendahnya, hingga diperkirakan hanya cukup memenuhi kebutuhan domestik. Produksi di Sulawesi Utara sendiri diperkirakan dalam tahun 1972 turun dengan 50% dan mencapai titik terendah pada tahun 1973. Hal ini diikuti pula oleh kenaikan harga yang tajam dari Rp. 56,74/kg pada tahun 1972 menjadi Rp. 128,84/kg pada tahun 1973 (kenaikan 127%) dan menjadi Rp. 190,82/kg pada tahun 1974 atau 226% di atas harga tahun 1972, diukur dengan harga rata-rata per tahun

¹ Laporan Mingguan Bank Indonesia, No. 904, 15 Mei 1975.

² Ibid.

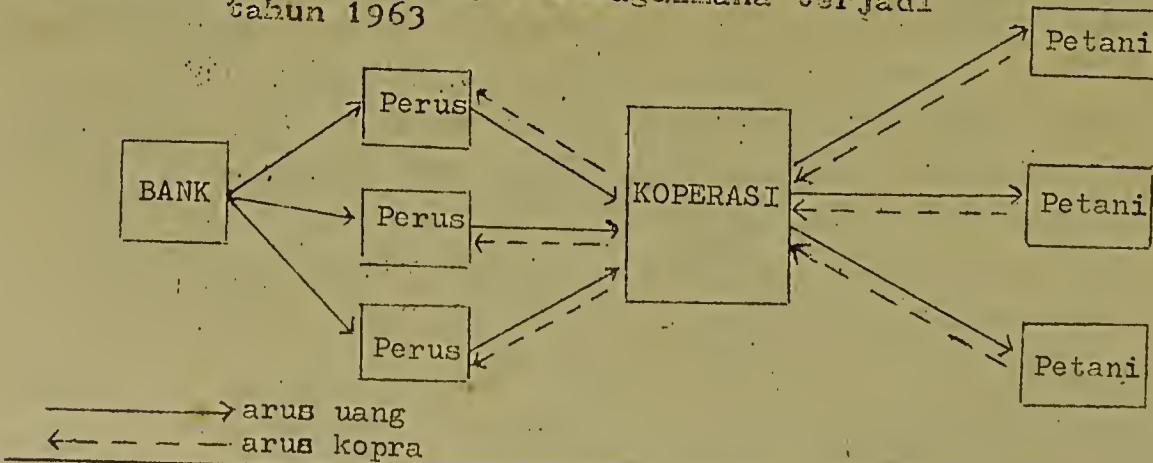
³ Biro Pusat Statistik, Indikator Ekonomi, No. 6/75, Juni 1975.

di tingkat perdagangan besar di Jakarta. Akan tetapi dengan berakhirnya musim kering, produksi kopra Indonesia pun pada akhir tahun 1974 telah mulai pulih ke tingkat yang lebih tinggi dari kebutuhan domestik. Bersamaan dengan turunnya harga kopra di pasar dunia, harga kopra di dalam negeri juga turun hingga menjadi Rp. 74,98/kg pada bulan Juni 1975,¹ yang bila diindeks dengan harga tahun 1972 sebenarnya hanya merupakannya 62%.²

Tidak perlu diingkari bahwa perkembangan harga yang demikian memang sangat banyak dipengaruhi oleh iklim perdagangan kopra di pasar dunia. Akan tetapi bagaimanapun juga di samping faktor tersebut masih terdapat faktor lain di dalam negeri yang kiranya turut mempengaruhi kecenderungan ini. Di antaranya dapat kami sebut peranan lembaga Pemerintah yang secara berganti-ganti dikhawasukan untuk mengurus perdagangan kopra. Demikian juga dengan kebijakan Pemerintah sendiri yang kelihatannya tidak dilengkapi dengan langkah alternatif atau opsi, sehingga bila program tidak berjalan sebagaimana direncanakan, maka fakta tersebut tidak dapat dielakkan, pun dalam jangka waktu yang relatif panjang seperti sekarang ini.

Apabila yang dilihat adalah tata kelobiagaan yang mengurus kopra, maka prosesnya dapat diuraikan sebagai berikut. Pada tahun 1963 Koperasi adalah merupakan monopolis sebagai pembeli dari petani. Karena "management failure" Koperasi itu tidak dapat lagi berperan menguntungkan petani, malahan sebaliknya, ketika itu kopra petani adakalanya hanya dibayar dengan bon-bon kosong. Proses perdagangan ketika itu kiranya dapat dilihat secara visul dalam Gambar-1 berikut ini.

Gambar-1 : Transaksi kopra sebagaimana terjadi tahun 1963



¹ Ibid.

² Indeks biaya hidup di Jakarta telah naik dari 680 pada tahun 1972 menjadi 1.455 pada bulan Juni 1975. Dengan demikian harga riil dari harga historis bulan Juni 1975 = $680/1.455 \times$ harga historis bulan Juni.

Adalah jelas bahwa dalam situasi perdagangan semacam itu koperasi sesungguhnya tidak berdaulat lagi sebagai suatu saluran perdagangan karena ia telah tergantung, dalam arti permodalan, kepada perusahaan-perusahaan yang membeli kopra dari koperasi, walaupun yang terakhir ini memperoleh modalnya dari bank-bank termasuk bank milik Pemerintah. Kegagalan koperasi ini mengakibatkan timbulnya kembali dagang bebas, yang rupanya belum juga dapat dipisahkan dengan kegiatan non-perdagangan seperti pemberian uang muka pada petani untuk mengikat petani tersebut pada transaksi selanjutnya. Kegiatan semacam ini, apabila diawasi, memang tidak selalu merugikan petani, akan tetapi dalam kenyataan pengawasan yang demikian adalah amat susah dilakukan, terlebih-lebih kalau petani tidak mempunyai pilihan lain untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Dalam keadaan seperti itu terdapatlah kemungkinan-kemungkinan berikut:

1. Petani mengkonsumir pendapatannya yang akan datang, karena pendapatan pada panen sebelumnya tidak disebar pemakaiannya berdasarkan panjangnya waktu antara dua panen yang berturutan.
2. Pemilik kekayaan lepas mempunyai kesempatan memberikan uang muka pembelian kepada petani, yang penagihannya diharuskan berupa hasil pertanian dengan diperhitungkan tingkat bunga.

Hal yang serupa juga telah terjadi sejak diterapkannya kembali dagang bebas yang menurut pengakuan dari beberapa petani kopra dan pabrik pengolah di Sulawesi Utara dan Tengah, masih berjalan sampai sekarang.

Di samping itu kiranya perlu juga dikemukakan bahwa sifat tumbuhan kelapa itu sendiri telah mempengaruhi mobilitas petani. Karena proses alamiah masih lebih berperan daripada kerja manusia dalam pengurusan kopra, maka petani condong pasif menunggu panen yang biasanya datang secara teratur. Oleh karena itu pengalihan kegiatan ekonomi amat sulit diwujudkan kendatipun telah dapat diperhitungkan bahwa ketertangan atas sumber tunggal tersebut sudah tidak cukup untuk mendukung biaya hidup sehari-hari. Beberapa contoh kiranya dapat membuktikan sikap ini seperti penolakan penduduk tertentu di Sulawesi Tengah untuk dipindahkan ke lingkungan yang lebih subur hanya karena ongan meninggalkan beberapa puluh pohon kelapa yang dimiliki. Ditambah pula dengan

penyuluhan yang tidak dilakukan secara terperinci, maka semakin besarlah ketergantungan pemilik pohon kelapa atas kebutuhan yang semakin menyempit.

Dengan demikian, kiranya telah menjadi jelas bahwa kesulitan yang dialami oleh petani kelapa di Sulawesi Utara dan Tengah dewasa ini tidaklah semata-mata merupakan akibat dari kondisi pasar dunia, akan tetapi lebih dari itu, terdapat beberapa faktor lain yang saling mempengaruhi, oleh karena itu pemecahannya juga harus menyeluruh, bahkan perlu memperhitungkan keadaan pasar di dalam negeri sebagai pasar utama.

III. Beberapa Masalah Pokok

Di atas telah kami uraikan secara historis kesukaran yang dialami petani kelapa dewasa ini. Akan tetapi uraian tersebut belum meliputi identifikasi masalahnya. Bagian ini kami khususkan untuk membahas masalah-masalah tersebut.

Masalah pertama yang senantiasa dialami petani pada umumnya dan petani kelapa pada khususnya adalah diskontinuitas pendapatan sesuai dengan masa panen. Bagi petani kelapa, diskontinuitas ini dapat dilihat dalam Gambar-2 (lihat halaman 9) berikut, yang juga kami sertai dengan kurve biaya hidup di desa.¹ Pada Gambar-2 dapat dilihat pendapatan petani yang memiliki 100 pohon kelapa yang diperkirakan menghasilkan 250 kg kopra per panen.² Dengan harga yang berlaku,³ ternyata pendapatan penjualan petani telah turun dari Rp. 37.670,- pada bulan Januari 1974 menjadi Rp. 16.045,- pada panen bulan April 1975.

¹ Perhitungan biaya hidup kami dasarkan pada hasil Survey Biaya Hidup di Menado 1970-1971, dengan mengindeksnya kembali sesuai dengan Indeks Biaya Hidup di kota tersebut. Besarnya biaya hidup di desa kami perhitungkan 69% dari biaya hidup di kota, sesuai dengan persentase pengeluaran penduduk yang diperoleh dari Survey Sosial Ekonomi Nasional Oktober-Desember 1969.

² Angka 100 pohon kami pakai sesuai dengan rata-rata pohon kelapa per pemilik di Sulawesi Utara dan Tengah, dan diperkirakan menghasilkan kopra 1 ton per tahun.

³ Harga historis kami hitung sebesar 70% dari harga perdagangan besar di Jakarta sesuai dengan perbandingan harga yang berlaku pada bulan Juni 1975 di Sulawesi Utara dan Tengah dengan harga perdagangan besar di Jakarta.

Gambar-2 : Diskontinuitas Pendapatan Petani karena pengaruh panen dan harga dibandingkan dengan biaya hidup

dalam
ribuan
rupiah

37.670

37.495

34.545

29.035

Biaya hidup
di desa =
69% x Manado

19.642

16.4045

← 3

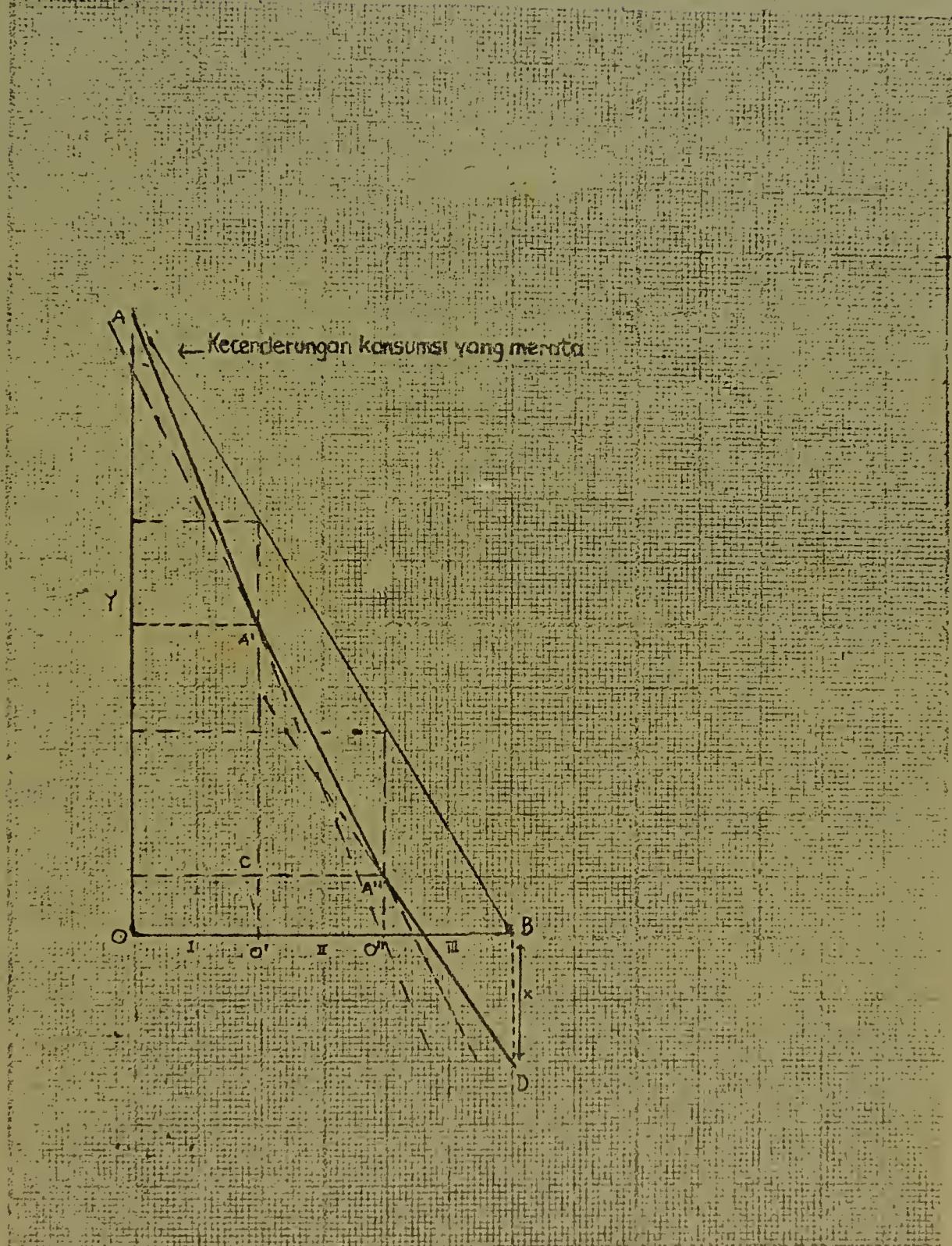
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar

Konsum-
si mak-
simum
per bu-
lan atau
dasar
pendapa-
tan nya-
ta

Untuk sementara dimisalkan bahwa petani dapat mengatur penggunaan pendapatannya sedemikian rupa, sehingga penerimaan dari suatu panen digunakan secara merata untuk 3 bulan. Dengan demikian kerunginan penggunaan pendapatan dari kopra oleh petani yang bersangkutan akan berlangsung seperti tergambar dalam garis-a. Di lain pihak dari gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa biaya hidup telah senantiasa meningkat dari Rp. 18.232,- untuk keluarga yang terdiri dari 7 orang pada bulan Januari 1974 hingga menjadi Rp. 20.477,- pada bulan Maret 1974. Dengan perkataan lain, bagian biaya hidup yang tidak dapat dikonsumir petani kelapa telah senantiasa membesar. Apabila petani yang bersangkutan tidak memiliki bidang usaha lain maka selisih tersebut harus dibatalkan pemenuhannya atau dicari melalui sumber lain berupa pinjaman bila memang tidak dapat ditangguhkan. Sebaliknya apabila petani kita itu masih memiliki bidang usaha lain, maka bagian yang tidak dapat dipenuhi melalui pendapatan kopra sesedikitnya akan dapat diperkecil, walaupun bagi si petani turunnya pendapatan kopra dengan sendirinya memperkecil daya konsumsinya.

Andaikan petani yang bersangkutan memang harus mengurangi konsumsinya, terdapat batas tertentu yang tidak mungkin dilewati ke bawah, yaitu tingkat hidup minimum, yang mungkin lebih kecil dari biaya hidup yang kami perkirakan di atas, tapi sekaligus juga mungkin lebih tinggi dari pendapatan si petani dari hasil kopra. Selisih antara kebutuhan hidup minimum dengan pendapatan dari kopra dalam hal ini, kiranya hanya dapat dipenuhi dengan pinjaman, dan kalau demikian, biasanya saluran yang tersedia bagi petani adalah para pedagang pengumpul kopra. Pinjaman ini kemudian oleh si pemberi pinjaman diperhitungkan sebagai uang muka pembelian dan dikenakan bunga yang tinggi, yang pada gilirannya akan amat memperlemah posisi petani dalam transaksi selanjutnya. Di samping itu, kecenderungan mengkonsumir pendapatan yang akan datang juga mungkin timbul, karena kebiasaan yang umum terdapat di kalangan petani, berupa kecenderungan mengkonsumir dengan tingkat yang relatif tinggi pada masa segera sesudah panen, tanpa atau kurang memperhitungkan hingga periode panen berikutnya. Kalau petani telah mengkonsumir pendapatannya yang diantisipasi, maka garis konsumsinya tidak lagi seperti garis-a dalam Gambar-2, akan tetapi sudah berubah kira-kira seperti dalam Gambar-3.

Gambar-3



Dalam Gambar-3, garis konsumsi bukan lagi merupakan garis lurus, akan tetapi telah menjadi garis terputus-putus yang merupakan kombinasi dari 3 garis konsumsi, seperti AA'A'D. Pada bulan pertama, ketika petani menerima pendapatan dari satu panen, garis konsumsi itu adalah curam, dan kalau diteruskan, pendapatan tertentu sebesar OA hanya akan cukup untuk 2 bulan. Akan tetapi pada bulan kedua petani mungkin menyadari bahwa pendapatannya yang tersedia telah mengocil, dan akibatnya garis konsumsinya pun berubah menjadi lebih landai, misalnya A'A''. Pada bulan ketiga ternyata sisa pendapatannya adalah O''A'' yang tidak cukup mendukung kebutuhan minimum. Dan walaupun garis konsumsinya (A''D) kembali lebih landai dari A'A'', namun untuk memenuhi kebutuhan minimumnya petani yang bersangkutan harus mengkonsumsi pendapatan yang akan datang sebesar ED atau Rp. X,-. Untuk itu ia dibebani bunga sebesar p%, sehingga pendapatan panen berikutnya yang berhak ia terima bukan lagi sebesar AB atau Y, tapi secara umum hanyalah:

$$Y_n = Y - X(1 + p)^n$$

Kalau proses ini terus berlangsung maka ketergantungan petani pada uang muka akan semakin ketat, dan bagian dari hasil panen yang akan datangpun akan semakin kecil pula. Dengan demikian masalah yang harus dipikirkan dalam hal ini adalah bagaimana menghilangkan faktor X, baik dengan mengatur pola konsumsi petani maupun dengan cara lain, yang akan kami bahas ketudian di bagian lain dari penelitian ini. Sudah barang tentu juga, bahwa dalam hal ini kecenderungan harga harus diperhitungkan untuk sedapat mungkin mempertahankan tingkat konsumsi bagi petani, kendatipun harga pasar menurun.

Masalah kedua yang perlu dibahas adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan petani dalam perkebunan kelapa dan proses pengolahan kopra hingga siap untuk dijual. Analisa atas faktor ini terutama diperlukan untuk mengetahui sampai berapa jauhkah pengusahaan kopra dapat dikatakan rasional ekonomis. Dengan memakai kembali ukuran 100 pohon kelapa atau 1 ton kopra/tahun, biaya-biaya terpenting yang harus dipikul si petani adalah:¹

- pemeliharaan kebun	Rp. 10.000,-
- petik kelapa	" 2.000,-
- kupas dan jemur	" 9.000,-
- cincang	" 285,-
- pengangkutan	" 1.050,-
- Ipeda	" 625,-
Jumlah	Rp. 22.960,-
	=====

¹ Jumlah ini adalah hasil tanya jawab kami sendiri dengan 3 orang petani kelapa di desa Pantoloanwani, Sulawesi Tengah.

Jumlah ini sebenarnya masih harus ditambah dengan biaya lain seperti untuk peremajaan yang mungkin tidak banyak diperhatikan petani. Akan tetapi dengan jumlah biaya di atas saja, petani sebenarnya hanya mempunyai pendapatan yang amat kecil, yaitu untuk 3 bulan pertama tahun 1974 hanya sekitar Rp. 14.710,-.

Dalam hal ini memang masih dibutuhkan penelitian yang lebih cermat tentang pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan petani sesuai dengan kapasitas produksinya selama satu tahun. Pekerjaan-pekerjaan mana dengan derikian tidak perlu dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi di antara biaya tersebut terdapat pos tertentu yang tidak dapat dikerjakan sendiri oleh petani, seperti biaya pengangkutan, yang sering merupakan kegiatan lain dari pedagang pengumpul kopra, dan Ipeda. Artinya, pendapatan petani yang kami gambarkan dalam Gambar-2 adalah terlalu besar, dan oleh karena itu, selisih biaya hidup dengan pendapatan petani juga digambarkan terlalu kecil.

Di samping itu terdapat juga masalah lain yang menyangkut kualitas produksi kopra petani. Karena peralatan pengeringan dan faktor kebutuhan yang mendesak maka hasil panen kopra sering telah dijual kendatipun kadar airnya masih di atas 15%, bahkan mungkin beberapa pedagang kadang-kadang sampai 20%. Akibatnya harga yang berlaku juga menjadi lebih rendah, sebab kopra yang dianggap baik oleh pembeli adalah yang berkadar air maksimum 5%. Kalau faktor ini dimasukkan untuk mencari besarnya pendapatan petani, maka jumlah yang kami gambarkan dalam Gambar-2 masih harus dikurangi sebab harga Rp. 53,-/kg sebenarnya adalah untuk kopra yang berkadar air 5%, sedang kopra petani dengan kualitas seperti di atas, paling tinggi hanya dapat dijual dengan harga Rp. 40,-/kg, yang di lain pihak juga akan makin mengecil tergantung pada lokasi penjualan. Makin transaksi tersebut jauh dari pusat perdagangan maka makin rendahlah harganya, dan diperkirakan di desa terjauh harga itu tidak lebih dari Rp. 25,-/kg.

Masalah selanjutnya yang juga tidak kurang penting adalah makin sedikitnya pohon kelapa yang dimiliki petani karena lahirnya generasi baru. Apabila tidak terdapat perluasan perkebunan, maka setelah satu generasi, per pemilik yang kini masih mempunyai 100 pohon kelapa akan turun menjadi 33 pohon dengan anggapan bahwa tiap pemilik sekarang mempunyai 3 orang ahli waris.

Kalaupun dewasa ini peremajaan telah dilakukan secara berangsur, namun mengingat usia kelapa yang ada, maka peremajaan tersebut diperkirakan belum akan menambah jumlah pohon yang produktif, sesedikitnya untuk jangka pendek. Pertanyaan yang harus dijawab adalah lapangan kerja sementara yang harus disediakan hingga tanaman baru mencapai usia produktif. Kami sebut lapangan kerja sementara karena sejumlah petani harus dipertahankan di bidang usaha kopra sesedikitnya untuk dapat menghasilkan kebutuhan dalam negeri yang semantiasa meningkat.

Masalah terakhir yang kami bahas dalam penelitian ini adalah kebijakan (policy) Pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan petani dalam mengurus kopranya. Di antaranya yang akan kami bahas adalah kebijakan harga, perkreditan dan kelembagaan, dengan terlebih dahulu memperkirakan kebutuhan dalam negeri akan kopra di tahun-tahun mendatang.

Di bidang produksi kiranya adalah tepat, apabila sebagai prinsip dikatakan, bahwa Indonesia sesedikitnya harus mampu memproduksir jumlah yang dibutuhkan di dalam negeri, antara lain untuk memperbesar kesempatan kerja dan menghemat devisa untuk dapat dipergunakan mengimpor barang-barang modal. Kami sendiri tidak mengetahui dengan pasti berapa besar konsumsi kopra Indonesia dewasa ini, akan tetapi jumlah itu kiranya dapat didekati dengan menganggap produksi kopra yang tidak diekspor adalah sama dengan konsumsi dalam negeri. Anggapan ini kiranya dapat dibenarkan untuk keadaan tahun 1973 pada periode di mana pasar dunia mengalami kekurangan penawaran, sehingga kalaupun negara penghasil tidak meningkatkan ekspornya tentulah dengan tujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Produksi kopra Indonesia tahun 1973 seluruhnya berjumlah 1.198.000 ton¹ dan di antaranya diekspor 65.000 ton, sehingga dengan demikian konsumsi dalam negeri adalah 1.134.000 ton atau 9 kg per kapita. Tentu ada kemungkinan bahwa kopra diekspor setelah diolah menjadi minyak kelapa. Akan tetapi setelah kami teliti data tentang ekspor Indonesia dan barang-barang tujuan luar negeri yang dimuat di beberapa pelabuhan penting, ternyata angka itu tidak ada. Dimisalkan sekarang bahwa konsumsi per kapita yang 9 kg tersebut hendak dipertahankan untuk beberapa tahun mendatang, maka pada tahun 1978 dapat

¹ Lihat Nota Keuangan dan RAPBN 1975/76, hal. 247, 250 dan 253.

diperkirakan bahwa Indonesia membutuhkan 1.274.000 ton kopra atau 75.400 ton di atas produksi tahun 1973. Pertambahan konsumsi ini hanya dapat dipenuhi dengan menambah pohon kelapa produktif sejumlah 7.540.000, karena untuk menghasilkan 1 ton kopra per tahun dibutuhkan 100 pohon kelapa. Kalau misalnya penduduk Indonesia pada tahun 2000 berjumlah 250.000.000 orang, maka kebutuhan kopra pada saat itu akan mencapai 2.250.000 ton atau 1.051.000 ton di atas produksi tahun 1973, dan untuk itu dibutuhkan pertambahan pohon kelapa produktif sejumlah 105.100.000 pohon. Kelihatannya tahun 2000 memang masih jauh, akan tetapi apabila dilihat dari usia pohon kelapa, maka sebenarnya menjadi tanda tanya besar apakah jumlah tersebut dapat dipenuhi tepat pada waktunya.

Kebutuhan akan produksi yang senantiasa meningkat tersebut di segi lain adalah peluang yang baik bagi petani untuk memperluas perkebunannya. Akan tetapi kesempatan ini juga harus ditinjau dari segi kebijakan harga yang dianut Pemerintah, karena kalaupun proyeksi kebutuhan menunjukkan kecenderungan naik, tidaklah sekaligus berarti bahwa petani akan diuntungkan.

Dalam suatu kebijakan harga yang banyak ditujukan untuk memelihara stabilitas moneter, sebagaimana telah lama menjadi sasaran antara dalam pembangunan ekonomi Indonesia, ada kalaunya harga suatu komoditi dibuat lebih rendah dari harga pasar dengan tujuan untuk menekan kontribusinya dalam inflasi. Akan tetapi sebaliknya juga dapat terjadi di mana harga suatu komoditi ditetapkan atau dibiarkan lebih tinggi dari harga pasar untuk melindungi kelangsungan hidup atau pertumbuhan suatu bidang usaha, seperti apa yang terjadi atas tekstil dan ban, yang implementasinya dilakukan dengan menghentikan atau membatasi impor produk serupa yang harganya lebih rendah atau juga dengan mengenakan bea masuk yang amat tinggi bagi produk impor tersebut.

Kalau yang dilihat adalah kebijakan harga dewasa ini, kiranya dapatlah dikatakan bahwa petani kopra belum diuntungkan, sebagaimana terlihat dari tidak-adanya campur-tangan Pemerintah atas harga kopra yang sudah lebih rendah dari biaya hidup, dan bahkan lebih rendah dari biaya produksi bila dilihat secara ekonomis. Padahal justru pada saat seperti ini-lah campur tangan tersebut diperlukan, bukan saja karena pertimbangan sosial dalam menjamin kelangsungan hidup petani, tapi juga sekaligus untuk menunjang peningkatan produksi kopra

di masa kini dan masa depan. Kiranya tidak ada salahnya apabila berbagai bentuk perlindungan ekonomis yang telah diberikan kepada proyek-proyek PMA dan PMDN juga dicoba untuk diterapkan secara selektif atas bidang usaha tradisionil yang dilakukan oleh rakyat banyak, misalnya dalam hal kopra dengan menentukan harga minimum yang lebih tinggi dari harga yang terjadi dengan cara lain. Kebijakan ini kami anggap perlu untuk memberi geirah kepada petani, sebab mereka tentu tidak mau memperluas usahanya hanya karena mendapat instruksi dari lembaga Pemerintah, kecuali apabila kepada mereka dapat digambarkan masa depan yang lebih baik dengan tetap berusaha di bidang yang bersangkutan.

Di bagian depan dari penelitian ini telah digambarkan perwujudan transaksi kopra ketika koperasi masih merupakan monopolis dalam perdagangan, sedang di bagian lain telah pula dikemukakan bahwa petani sering menjadi korban pedagang pengumpul melalui penerimaan uang muka. Itu berarti bahwa hubungan kredit juga dibutuhkan dan dapat dipergunakan untuk menjamin kelangsungan usaha kopra dan sekaligus membantu petani pada masa pacaklik. Masalahnya adalah, sejauh manakah lembaga yang berhak menyalurkan kredit mengerti dan mau melayani kebutuhan yang demikian.

Apabila kepada suatu perusahaan industri atau perdagangan, lembaga perbankan bersedia memberi kredit berdasarkan analisa atas the five C's, dan kemudian sebagian dari kredit ini digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan sebagai uang muka kepada petani, maka saluran langsung antara bank dan petani pun kiranya tidak mustahil. Perbedaan antara kemungkinan pertama dengan kemungkinan yang kedua sesungguhnya hanya terletak pada luasnya komunikasi yang harus dilayani oleh bank, yang memang tidak perlu diingkari mempengaruhi biaya kredit. Akan tetapi masalah yang demikian kiranya tidak perlu timbul kalau antara bank dan petani terdapat lembaga perantara, katakan saja misalnya "Pusat Kopra" yang dilola oleh tenaga ahli dan bertanggung jawab langsung kepada petani dan bukan kepada Pemerintah. Lembaga ini akan kami laksanakan sebelum bagian penutup dari penelitian ini, karena untuk dapat mengerti lembaga tersebut terlebih dahulu harus diterangkan hal-hal yang perlu dikerjakannya.

IV. Kemungkinan Stabilisasi Pendapatan Petani

Yang kami maksud dengan stabilisasi pendapatan petani dalam penelitian ini adalah pemeliharaan daya beli petani pada tingkat yang sesedikitnya sama dengan daya beli yang dibutuhkan untuk memenuhi biaya hidup. Oleh karena itu pendekatannya dapat dilakukan dengan kebijakan harga yang tepat, peningkatan kapasitas produksi per pemilik dengan intensifikasi dan ekstensifikasi dan penyebaran daya-beli yang diterima petani pada suatu panen, hingga mencukupi sampai panen selanjutnya.

Stabilisasi pendapatan petani melalui kebijakan harga sebenarnya telah dianut dalam bidang usaha pertanian padi dengan penerapan suatu batas harga antara "floor dan ceiling price", yang apabila dilewati akan dikompensir kembali dengan pembelian dan atau penjualan Pemerintah. Pada dasarnya kebijakan harga seperti ini juga dapat ditrapkan pada bidang usaha kopra dengan terlebih dahulu menyelesaikan perhitungan-perhitungan berikut. Pertama harus ditetapkan jumlah pohon kelapa yang dapat diurus si petani tanpa perlu mengurusi bidang usaha lain, berdasarkan kapasitas produktif normalnya. Jumlah ini kiranya masih memerlukan penelitian, sebab petani dengan 25 pohon kelapa misalnya tidak perlu dipaksakan untuk hanya hidup dari hasil kebun tersebut.

Untuk dapat melanjutkan perhitungan ini maka kami misalkan bahwa jumlah tersebut adalah 300 pohon, yang berarti secara normal menghasilkan 750 kg kopra setiap panen yang harus diolahkan sebagai sumber pendapatan satu-satunya dari petani yang bersangkutan. Karena biaya hidup untuk bulan Maret 1975 untuk keluarga yang terdiri dari 7 orang telah menjadi Rp. 20.447,- dan dimisalkan sama dengan dua bulan selanjutnya, maka harga kopra minimum adalah Rp. 81,80/kg, suatu tingkat harga yang kira-kira 54% di atas tingkat harga nyata pada bulan yang bersangkutan. Karena konsumsi kopra nasional diperkirakan 9 kg/kapita, maka dengan harga minimum tersebut nilai kopra yang dikonsumir seharusnya naik dengan Rp. 34.240,32 juta. Angka ini belumlah merupakan angka yang pasti karena ia tergantung pada basis yang digunakan. Pertama-tama ia tergantung pada ketepatan atau kekeliruan taksiran pohon kelapa yang dipakai sebagai dasar, sedang di pihak lain ia juga tergantung pada biaya hidup yang sesungguhnya.

Harga minimum tersebut tidak perlu setiap saat disesuaikan dengan indeks biaya hidup, tapi cukup kiranya apabila dilakukan setiap 3 bulan sekali sesuai dengan masa panen. Itu berarti, bahwa petani masih tetap menghadapi risiko turun naiknya pendapatan, karena indeksasi harga minimum kopra mungkin terlambat dibandingkan dengan perkembangan biaya hidup. Tentu dalam indeksasi tersebut akan dihadapi kesukaran-kesukaran tertentu, akan tetapi indeksasi harga yang demikian kiranya adalah suatu kemungkinan yang perlu dianalisa lebih jauh, sebab dengan pendekatan yang demikian diharapkan pendapatan petani akan cukup untuk menunjang biaya hidupnya, dan produksi kopra Indonesia sesedikitnya dapat dipertahankan pada tingkat yang sama dengan kebutuhan dalam negeri.

Bagi petani kopra yang hanya memiliki pohon di bawah jumlah normal tersebut, dalam penelitian ini 300 pohon, diketahui harga yang sama dan oleh karena itu ia harus mempunyai pendapatan lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, sedang dari petani yang memiliki lebih dari 300 pohon, maka Pemerintah tentu dapat menarik pajak. Ada kemungkinan bahwa suatu ketika harga minimum tersebut oleh Pemerintah dianggap terlalu tinggi dan oleh karena itu hendak diturunkan, misalnya untuk memperkecil kontribusinya dalam inflasi. Dalam hal demikian Pemerintah dapat memberi subsidi kepada konsumen yang disalurkan melalui "Pusat Kopra", sehingga badan ini dapat membeli dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga penjualannya kepada konsumen kopra.

Kemungkinan stabilisasi yang kedua, berupa peningkatan produksi dari jumlah pohon yang sama, perlu juga ditempuh antara lain untuk memperkecil selisih harga minimum yang ditetapkan dengan harga yang mungkin timbul apabila pengawasan harga dilepas. Seandainya dari 300 pohon kelapa dapat dihasilkan 1 ton kopra per panen, maka harga minimum yang ditetapkan tidak perlu setinggi Rp. 61,80/kg, akan tetapi cukup Rp. 61,35 dengan harga mana kebutuhan hidup petani telah dapat dipenuhi. Akan tetapi hendaknya diingat bahwa basis perhitungan yang dipakai haruslah produksi normal, sehingga kalau seorang petani dapat menghasilkan produksi supernormal maka ia harus memperoleh premi untuk itu. Dengan kata lain, tidak setiap peningkatan produksi berarti penurunan harga minimum yang ditetapkan.

Kemungkinan stabilisasi harga di atas, di pihak lain sebenarnya belum menjamin kelangsungan konsumsi petani secara teratur dalam batas pendapatan tersebut. Sebagaimana telah kami singgung sebelumnya, terdapat kemungkinan bahwa garis konsumsi petani akan lebih curam pada masa segera sesudah panen untuk kemudian semakin landai, kendatipun tidak sedemikian landai, sehingga pengeluaran lebih kecil dari kebutuhan hidup minimum. Oleh karena itu masih harus dipikirkan bagaimana pendapatan petani harus dibayarkan oleh "Pusat Kopra" sehingga dapat diratakan meliputi seluruh periode antara satu panen dengan panen berikutnya.

Suatu pendekatan untuk tujuan seperti itu telah pernah dikemukakan oleh Daoed JOESOEF¹ dengan mengambil kasus karet. Pada garis besarnya analisa tersebut mengemukakan bahwa untuk stabilisasi penerimaan pendapatan petani diperlukan suatu badan yang berperan, antara lain, sebagai pembeli tunggal yang pada setiap transaksi tidak membayar jumlah yang sama dengan nilai transaksi tersebut kepada petani, akan tetapi sebagai gantinya, pembayaran tersebut terlebih dulu diratakan dengan pendapatan penjualan pada beberapa satuan waktu yang lalu, di samping memperhitungkan bagian tertentu dari nilai transaksi sebagai bagian yang dengan sendirinya akan diterima petani pada transaksi tersebut. Dengan demikian penerimaan petani tidak lagi sama dengan pendapatan penjualannya. Ia berubah naik atau turun tapi tidak secepat naik atau turunnya pendapatan penjualan yang merupakan perkalian antara kwantum transaksi dan harga. Perhitungannya dilakukan dengan menggunakan formula berikut:

$$I_t = \frac{Y_t}{X} + \frac{1}{n} \left\{ (Y_{t-1} + Y_{t-2} + \dots + Y_{t-n}) \times \frac{X-1}{X} \right\}$$

di mana: I_t = Pembayaran total yang diberikan kepada petani pada setiap transaksi

Y_t = Hasil penjualan pada saat transaksi

$\frac{1}{X}$ = Bagian pendapatan penjualan yang dibayarkan kepada petani pada setiap transaksi

n = Satuan waktu sebelum transaksi yang berjalan yang dipakai sebagai dasar perataan penerimaan petani.

Sekarang kita coba montrapkan formula ini pada petani kopra dengan pemisalan sebagai berikut:

¹ Daoed JOESOEF, "An Idea concerning Efforts to stabilize the Money Incomes of The Rubber Farmer-Producer", Economic Papers, Mei 1963.

- Petani kita memiliki 200 pohon kelapa dengan hasil 750 kg kopra/panen
- Kepada petani, pada saat transaksi "Pusat Kopra" membayar langsung sebesar $3/4$ atau $\frac{1}{X} = \frac{3}{4}$
- Petani kita menjual produksinya sekali setiap panen
- Perataan penerimaan ditrapkan mulai pada penjualan Januari 1974 dengan memakai $n = 3$ (penjualan pada 3 kali panen sebelumnya)

Setelah melakukan perhitungan secukupnya maka diperolehlah tabel-1 berikut ini yang memuat harga historis, pendapatan penjualan, penerimaan petani pada setiap transaksi dan saldo perkiraan petani di "Pusat Kopra".

TABEL 1

=====
PENDAPATAN PENJUALAN, PENERIMAAN PETANI YANG DIRATAKAN SETIAP PANEN
(dalam rupiah)

Panen	Harga per 100 kg	Pendapatan penjualan	Penerimaan petani	Saldo Debet. (Kredit)
April 1973	8.275	62.064	62.064	-
Juli	10.682	80.115	80.115	-
Oktober	10.631	79.731	79.731	-
Januari 1974	15.068	113.010	103.249	9.761
April	14.998	112.485	107.102	15.144
Juli	13.818	103.635	103.161	15.618
Oktober	11.614	87.105	92.755	9.960
Januari 1975	7.857	58.926	69.463	(577)
April	6.418	48.135	56.906	(9.348)
Juli	5.300	39.750	45.992	(15.590)

Dari tabel-1 dapat dilihat bahwa penerimaan petani dapat lebih diratakan sedemikian rupa sehingga kalaupun penerimaan tersebut naik atau turun, namun kenaikan dan turunnya tidak sebesar kenaikan atau turunnya pendapatan penjualan, dengan syarat bahwa "Pusat Kopra" dapat menyimpan kelebihan pendapatan penjualan yang belum dibayarkan. Dan sebaliknya memberikan uang muka kepada petani, bila pendapatan penjualan ditambah dengan saldo debet sebelumnya lebih kocil dari penerimaan yang telah diratakan.

Dari angka-angka historis ini dapat dilihat bahwa kalaupun diandaikan bahwa "Pusat Kopra" dapat beroperasi sebagai bank bagi petani, namun masih terdapat dua masalah. Pertama, karena penerimaan yang diratakan tersebut sonantiasa monoton sejak

Juli 1974, dan bahkan pada bulan Juli 1975 hanya mencapai Rp. 15.992,- atau Rp. 15.330,- sebulan, sehingga mungkin lebih rendah dari biaya hidup. Masalah ini kiranya hanya dapat diatasi apabila terdapat harga minimum kopra yang ditetapkan lebih tinggi dari harga yang mungkin menjadi kenyataan seandainya harga minimum tersebut tidak ada. Kedua, belum ada jaminan bahwa penerimaan yang diratakan tersebut akan diberikan secara merata hingga mencukupi kebutuhan 3 bulan.

Bagi petani karet masalah ini mungkin tidak menonjol karena pemotongan hasil yang tidak begitu terputus-putus. Dengan perkataan lain, dalam kasus karet, timbulnya pendapatan adalah lebih bersamaan waktunya dengan timbulnya kebutuhan menkonsumir. Lain halnya dengan kopra yang secara normal hanya panen 4 kali setahun, sehingga hasil suatu panen harus diratakan paling sedikit untuk kebutuhan 3 bulan. Pendekatan dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk sama sekali menghilangkan kebiasaan petani, sebab bagaimanapun juga pendekatan tersebut harus melayani petani, dan bukan sebaliknya.

Kembali dalam hal ini dibutuhkan penelitian tentang korelasi pendapatan penjualan dengan penggunaannya, akan tetapi untuk meneruskan perhitungan ini dimisalkan bahwa perbandingan antara bagian pendapatan yang digunakan pada bulan pertama, kedua, dan ketiga sesudah panen, yang dikehendaki adalah 7 : 6 : 5. Kalau demikian maka "Pusat Kopra" tidak lagi melukukan pembayaran hanya dengan menggunakan formula di depan ($I_t = \dots \dots \dots \dots \dots$), tapi secara bertingkat dengan memperhitungkan penggunaan yang dikehendaki. Pada bulan pertama pembayaran tidak boleh melebihi $\frac{7}{18} I_t$, pada bulan kedua $\frac{6}{18} I_t$, dan pada bulan ketiga $\frac{5}{18} I_t$. Apabila faktor ini telah diperhitungkan dalam penerimaan petani, maka penerimaan tersebut akan dilakukan setiap bulan dan besarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel-2 (lihat halaman 22).

Perhitungan dalam Tabel-2, bila ditrapkan, adalah jelas merupakan suatu pengaturan atas penggunaan pendapatan petani yang mungkin oleh petani dianggap sebagai campur tangan yang terlalu jauh. Akan tetapi menurut hemat saya, sebagaimana telah diassumsi sejak permulaan dari penelitian ini, petani memang masih harus dididik berkonsumsi. Kalau tidak, mungkin ia akan tetap merupakan obyek yang empuk bagi kegiatan pedagang perantara, terlebih-lebih bila dalam pasar penawaran dapat menciptakan permintaan.

TABEL 2

PENERIMAAN PETANI SETELAH DIRATAKAN KEMBALI

Bulan	Jumlah	Bulan	Jumlah
1974		1975	
Januari	40.152	Januari	27.013
Februari	34.416	Februari	23.154
Maret	28.681	Maret	19.296
April	41.651	April	22.130
Mei	35.700	Mei	18.968
Juni	29.751	Juni	15.808
Juli	40.131	Juli	17.886
Agustus	34.397	Agustus	15.330
September	28.665	September	12.776
Oktober	36.071		
Nopember	30.198		
Desember	26.486		

Diandaikan sekarang bahwa stabilisasi penerimaan di atas dapat ditrapkan, maka masih terdapat masalah lain yaitu apabila petani kopra tidak menjual produksinya sekali tiga bulan, tapi sebagai gantinya, pada waktu dan frekwensi yang tidak tertentu sepanjang tiga bulan itu. Pertanyaan yang harus dijawab adalah, berapakah besarnya pembayaran yang harus dilakukan "Pusat Kopra" kepada petani pada setiap transaksi. Perhitungannya harus tetap didasarkan pada besarnya pendapatan per panen yang diratakan (I_t). Kemudian tiap volume transaksi, katakan saja z , dibandingkan dengan produksi per panen yang diharapkan yaitu 750 kg untuk petani yang memiliki 300 pohon kelapa. Besarnya z akan menentukan besarnya bagian I_t yang akan dibayarkan pada tiap transaksi, dengan memperhatikan jumlah penjualan sebelumnya yang telah diwujudkan. Apabila penjualan kumulatif masih lebih kecil atau sama dengan $291,62$ kg ($\frac{7}{3} \times 750$ kg), maka bagian yang dibayarkan adalah sebesar $\frac{z}{750} \times I_t$. Akan tetapi bila penjualan kumulatif telah $291,62$ kg maka sebelum bulan kedua sesudah panen pembayaran pada petani harus ditangguhkan. Setelah bulan kedua pembayaran tersebut kembali diwujudkan dengan memperhatikan batas maksimum yang dapat diterima hingga akhir bulan kedua, yang secara kumulatif adalah $\left\{ \frac{7}{13} + \frac{6}{18} \right\} I_t$. Selama penjualan kumulatif belum melebihi $541,58$ kg ($= \frac{13}{18} \times 750$ kg), maka pembayarannya adalah sebesar $\frac{z}{750} \times I_t$. Akan tetapi bila penjualan kumulatif tersebut sampai akhir bulan kedua telah melebihi jumlah tersebut, maka pembayaran harus ditangguhkan hingga bulan ketiga. Penjualan pada bulan ketiga dengan sendirinya harus

dibayar secara proporsional terhadap total produksi untuk kemudian dikalikan kembali dengan I_t .

Yang sebaliknya juga mungkin dapat terjadi. Pada bulan pertama penjualan petani mungkin tidak mencapai 291,62 kg, sehingga bagian dari I_t yang akan diterima, bila didasarkan pada besarnya penjualan, tidak cukup untuk memenuhi biaya hidup. Dalam hal ini "Pusat Kopra" kembali dapat memberi kredit yang segera diperhitungkan pada transaksi berikutnya. Pemberian kredit ini penting artinya, karena kalau tidak demikian, kerawanan yang ada memungkinkan timbulnya pemberian uang muka oleh pemilik kekayaan lepas muncul kembali, dan dalam hal seperti itu eksistensi "Pusat Kopra" akan menjadi goyah. Sudah barang tentu bahwa pada tingkat pertama rekening debet petanilah yang diperhitungkan untuk memenuhi kekurangan tersebut dan baru setelah rekening ini juga tidak mencukupi, pemberian kredit dilakukan.

V. Pusat Kopra

Dalam pembahasan sebelumnya tentang kemungkinan stabilitasi pendapatan petani kopra, ternyata dibutuhkan suatu badan yang kami sebut "Pusat Kopra". Badan ini bukan badan Pemerintah, walaupun ia senantiasa harus bekerjasama dan dalam keadaan tertentu harus mendapat bantuan dari Pemerintah seperti dalam keadaan di mana harga kopra cenderung turun melewati harga minimum. Demikian juga bila Pemerintah mau wujudkan harga kopra yang direndahkan karena pertimbangan stabilitas moneter, maka "Pusat Kopra", karena posisinya sebagai pembeli tunggal dari petani, menjadi saluran yang paling baik untuk menyampaikan subsidi Pemerintah kepada konsumen dengan menjual kopra di bawah harga pembelian dari petani.

Badan ini dapat memiliki bentuk hukum Koperasi atau bentuk lainnya asalkan orientasinya senantiasa kepada petani. Dengan demikian terdapat perbedaan antara badan ini dengan Bulog yang berperan sebagai stabilisator harga untuk bahan-bahan pokok. Pusat Kopra tidak bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah, tapi sebaliknya bertanggung jawab kepada petani paling sedikit 1 kali setahun. Pertanggung-jawaban ini disampaikan oleh pengurus eksekutif dari badan tersebut yang juga harus bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris paling sedikit sekali tiap panen.

Pengurus eksekutif terdiri dari pekerja profesional yang secara penuh (full-timer) bekerja bagi Pusat Kopra. Anggota pengurus ini tidak perlu memiliki kewenang sendiri; kendatipun dari kalangan petani tetapi dimungkinkan duduk sebagai pengurus eksekutif. Sebaliknya bagian terbesar anggota Dewan Komisaris harus terdiri dari petani, didukung oleh tenaga ahli yang pada dasarnya bekerja sebagian waktu (part-timer) bagi Pusat Kopra, dan untuk jasa-jasanya juga harus diberi honorarium tertentu.

Secara organisatoris Pusat Kopra terdiri dari minimal departemen keuangan, departemen produksi termasuk bagian pengembangan tanaman dan pengolahan, departemen pemasaran (marketing) termasuk penelitian Pasar, di samping sekretariat yang mengurus organisasi Pusat Kopra itu sendiri.

Dalam kegiatannya, Pusat Kopra terutama akan berhadapan dengan petani dan pedagang atau pengolah yang menjadi pembeli dari badan ini. Dengan petani, badan tersebut harus mempunyai rekening yang tersendiri untuk setiap anggota, di samping menyimpan suatu "permanent file" berisi keterangan lengkap tentang anggota yang bersangkutan. Sebaliknya, hubungannya dengan pengolah atau pedagang kopra, harus bersifat rasional ekonomis, sebab badan tersebut harus memperoleh pendapatan tertentu sesedikitnya untuk memodali kegiatannya yang luas. Kerjasama dengan lembaga keuangan, terutama bank, adalah mutlak, sebab seluruh dana di atas jumlah tertentu harus setiap hari disetor ke bank, dan mungkin perlu dilekatkan dalam bentuk surat berharga atau deposito, bukan saja untuk menjamin keselamatan dana, tapi juga untuk memperoleh pendapatan tertentu.

Demikian juga dengan Pemerintah, badan ini harus menjalin hubungan yang erat. Pertama, karena badan ini berkewajiban melaksanakan peraturan Pemerintah, sedang kedua, memetik keuntungan dari lembaga-lembaga yang didirikan oleh Pemerintah untuk penelitian dan perencanaan. Akan tetapi inisiatif untuk bekerjasama hendaklah tetap di tangan Pusat Kopra, untuk menghindari campur tangan Pemerintah yang terlalu jauh atas badan tersebut. Sebaliknya Pemerintah juga harus melindungi badan ini sesedikitnya karena anggotanya terdiri dari petani. Beberapa perlindungan ekonomis mungkin harus diberikan, khususnya dalam masa pendirian. Di samping itu hendaklah disadari bahwa perlindungan ekonomis tidak hanya diperlukan untuk

usaha-usaha yang tergolong industri atau perdagangan modern saja, akan tetapi setiap subyek ekonomi sebenarnya mempunyai hak yang sama atas perlindungan tersebut dengan melihat peranan yang dilakukan oleh subyek tersebut dalam perbangunan ekonomi dan sosial.

Lokasi Pusat Kopra tergantung kepada pusat-pusat produksi kopra, karena dengan demikian diharapkan ia dapat lebih menge-nal anggotanya di samping mengurangi jenis biaya tertentu yang seharusnya dipikul petani seperti biaya pengangkutan yang umumnya akan lebih murah bila dilakukan secara besar-besaran. Dengan demikian badan ini disebut Pusat Kopra bukan karena ia hanya terdapat di satu tempat tapi adalah karena ia mencakup secara integral kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam pengembangan kopra dan kehidupan petaninya di lokasi tertentu.

VI. Penutup

Ada orang yang meramalkan bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi Indonesia mungkin harus mengimpor kopra. Ramalan ini tidak atas dasar guratan tangan petani, tapi sebaliknya adalah atas dasar perkiraan seperti perbandingan pertambahan pohon kelapa yang produktif dengan perkembangan penduduk dan perbandingan antara pohon kelapa usia tua yang akan tidak produktif dengan peremajaan. Akan tetapi ramalan tersebut kiranya harus dibuat meleset karena Indonesia secara tradisionil telah dikenal sebagai produsen dan eksportir kopra, dan karena bidang usaha kopra memberi lapangan kerja yang cukup besar bagi penduduk Indonesia, sedang di lain pihak impor kopra mungkin akan menimbulkan beban yang besar bagi Pemerintah seperti terjadi dengan impor beras. Itu berarti bahwa produksi kopra Indonesia harus senantiasa ditingkatkan sedikitnya untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Akan tetapi peningkatan yang demikian tidaklah sesederhana, diucapkan dan juga tidak sesederhana tumbuhnya pohon kelapa di dataran-dataran Sulawesi. Pertama-tama ia tergantung pada kebijakan Pemerintah, bukan pada pasar dunia, terutama yang menyangkut kebijakan harga. Pengalaman dewasa ini menunjukkan bahwa pendapatan kopra petani seluruhnya masih tergantung kepada mekanisme pasar kendatipun mekanisme tersebut tolak mengakibatkan pendapatan petani yang lebih rendah dari biaya hidup,

bahkan secara ekonomis lebih rendah dari biaya produksi. Padahal Pemerintah sebenarnya dapat melakukan intervensi harga sebagaimana telah ditrapkannya pada bidang usaha lain, baik yang bersifat langsung seperti pengawasan terhadap harga beras maupun yang bersifat tidak langsung seperti pemberian fasilitas yang beraneka ragam dalam rangka PMA dan FKDN. Apabila pada bidang-bidang yang terakhir ini Pemerintah bersedia memberi perlindungan ekonomis, kendatipun tidak selamanya menguntungkan baginya, maka di bidang usaha koprapun perlindungan tersebut kiranya dapat ditrapkan, yang dalam penelitian ini kami anjurkan dengan menetapkan harga minimum yang diawasi, yang lebih tinggi dari harga yang mungkin terjadi dengan cara lain. Pengawasan ini tidak saja dibutuhkan untuk memelihara daya beli tertentu dari petani kopra, tapi juga demi kepentingan nasional di masa depan.

Pemerintah tidak akan berhasil meningkatkan produksi kopra sebanding dengan pertambahan penduduk apabila petani kopra tidak diberi jaminan bahwa ia akan dapat hidup layak dengan melanjutkan usaha kopra. Kalau seandainya di pihak lain Pemerintah ingin mempertahankan harga kopra di tingkat rendah karena pertimbangan stabilitas moneter, maka ia harus memberi subsidi kepada konsumen dan pemberian ini hendaknya jangan dilihat sebagai subsidi kepada petani kopra. Demikian juga hendaklah kebijakan di dalam negeri tidak selamanya didasarkan pada kecenderungan harga di pasar dunia, sebab di samping mempunyai tujuan-tujuan ekonomis, kebijakan harga juga mempunyai tujuan lain yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Akan tetapi kalaupun diandaikan bahwa kebijakan harga seperti di atas sudah dapat ditrapkan, maka masih terdapat masalah lain yang mempengaruhi berhasil tidaknya kebijakan tersebut mencapai sasaran. Dalam perjalanan sejarah yang amat panjang masalah saluran perdagangan telah menjadi beban penghimpit yang amat berat bagi petani kita umumnya. Dan kendatipun pengalaman itu sudah demikian tuanya, namun pemberantas dan rekonstruksinya belum juga berhasil sepenuhnya. Sebab utama adalah saat yang tidak jatuh bersamaan antara kebutuhan mengkonsumir dan timbulnya pendapatan yang kemudian diperkuat oleh kecenderungan mengkonsumir dari petani yang menaik segera sesudah panen. Yang terakhir ini memang tidak perlu dihapuskan karena merupakan dinamika tersendiri bagi petani, akan tetapi adalah tidak tepat bila kebiasaan ini dibiarkan

berlangsung di mana petani itu sendiri kurang memikirkan masa-masa selanjutnya hingga panen berikutnya.

Tidak adanya alternatif dalam mencari sumber penerimaan untuk mendukung kehidupan sehari-hari memaksa petani untuk menerima uang tunai dari pedagang, kendatipun petani tersebut menyadari bahwa dengan cara itu bagian pendapatannya yang akan datang akan semakin diperkecil. Oleh karena itu, setelah menyadari kesukaran-kesukaran ini diperlukan suatu badan kopra yang integral seperti yang telah kami bahas sebelumnya. Namun segera sesudah pengusulan ini, kiranya badan ini sudah akan dicurigai sebagai penambah kerja berasa dan bukan sebagai pemecah masalah, karena pengalaman-pengalaman di masa lalu. Ada kemungkinan bahwa kegagalan lembaga-lembaga di masa lalu itu adalah karena ia secara langsung diurus Pemerintah sehingga lebih sering menjadi alat untuk melayani kepentingan Pemerintah dan bukan alat untuk melayani kepentingan petani.

Itulah sebabnya kami kemukakan bahwa Pusat Kopra harus merupakan milik petani yang sepenuhnya berorientasi pada petani, kendatipun ia harus melakukan kerjasama dengan lembaga lain termasuk yang merupakan lembaga Pemerintah. Kalau badan tersebut benar-benar milik petani dan dilola oleh tenaga baryawan yang dipilih oleh petani, jadi bukan ditunjuk oleh Pemerintah, maka campur tangan badan tersebut dalam pengurusan kopra kiranya dapat diterjemahkan sebagai kehendak petani itu sendiri. Akan tetapi kalaupun badan ini merupakan badan milik petani, maka ia harus senantiasa mendapat dukungan dari Pemerintah, sesedikitnya berupa dukungan yang setingkat dengan yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan-badan lain yang berperan dalam perekonomian Indonesia.

MENUJU PELAKUAN KEBUTUHAN BERAS SPUDIKI

R. HARYCSEPUTRO

"It is a dangerous illusion to believe that there can be any significant economic development in these (developing) countries without radically raising the productivity of agricultural labour". Gunnar Myrdal, "Paths of Development".

Sekitar 70% dari penduduk Indonesia yang berjumlah 125 juta jiwa hidup dan mendapatkan nafkahnya dari kegiatan pertanian. Maka dalam usaha pemerintah untuk menaikkan tingkat hidup rakyat, sektor pertanian mendapatkan perhatian khusus, sebab juga sektor inilah yang harus memberi makan penduduk yang berjumlah 125 juta jiwa tersebut. Masalah yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana mendorong petani-petani menaikkan produksinya, hingga Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangan nasionalnya. Untuk itu di satu pihak harus diciptakan keadaan, di mana para petani dapat merasakan keuntungan menghasilkan padi, tetapi di pihak lain, pemberian keuntungan kepada petani tidak boleh membebani konsumen beras terlalu berat. Jadi dalam kebijaksanaan peningkatan produksi beras pemerintah harus membangun keseimbangan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan petani dan kepentingan konsumen.

Secara garis besar usaha pemerintah Indonesia untuk mendorong petani meningkatkan produksinya bisa disingkatkan dalam dua hal, yaitu pertama, menyediakan kebutuhan-kebutuhan petani sebagai produsen padi, dan kedua, menaikkan pendapatan para petani dengan jalan menaikkan harga padi pada tingkat yang memadai.

BIKAS dan INMAS

Untuk melaksanakan hal yang pertama pemerintah mengadakan apa yang disebut BIKAS (Bimbingan Kassal). Bimas pertama mulai dilaksanakan pada musim tanam 1963/64, yang dikenal dengan nama Bimas Nasional. Pada musim tanam tahun 1966/69 Bimas Nasional dianggap gagal dan diganti dengan Bimas Cotong Royong.

Kemudian pada musim tanam 1970/71 sistem Bimas Nasional maupun Bimas Gotong Royong dihentikan dan diganti dengan Bimas yang disempurnakan. Kegagalan Bimas-Bimas itu sebenarnya disebabkan oleh karena ketidakmampuan badan yang dicerahi tanggung jawab pelaksanaannya. Hal ini akan diterangkan lebih lanjut di bawah.

Apa pemikiran yang mendasari diadakannya Bimas?

Pemerintah sadar, bahwa petani selalu kekurangan uang kontan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagai produsen padi. Kekurangan uang kontan dan tidak tersedianya kebutuhan-kebutuhan pertanian seperti pupuk, obat-obatan, benih dan peralatan, menyebabkan para petani menjadi umpan empuk bagi para tengkulak. Sebab untuk mendapatkan itu semua, petani terpaksa menjual panenannya sudah sedari permulaan musim tanam (praktek ijon). Tentu saja harga penjualan akan ditekan sangat rendah mungkin. Petani tidak lagi memikirkan, bahwa pada musim kemarau nanti mereka akan terpaksa membeli hasil mereka sendiri dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga penjualan mereka karena petani di samping sebagai produsen dia sendiri juga merupakan konsumen beras. Dengan demikian semakin lama petani akan menjadi semakin miskin.

Untuk mengatasi masalah itu pemerintah harus menyediakan uang kontan atau kredit dengan syarat-syarat yang amat ringan diperhitungkan berdasarkan kemampuan, petani mengembalikan kredit tersebut. Dengan tersedianya uang kontan lebih lanjut harus disediakan kebutuhan-kebutuhan pertanian, sehingga petani bisa dengan mudah mendapatkannya. Kecuali itu kepada para petani itu harus ditunjukkan hasil-hasil penyelidikan pertanian yang memungkinkan peningkatan hasil sawahnya. Maka pemerintah menyediakan penyuluhan-penyuluhan pertanian, yang bertugas membimbing petani-petani. Tetapi semuanya ini tidak akan ada manfaatnya, kalau petani tetap tidak bisa menjual hasil sawahnya dengan harga yang memadai. Maka harus diusahakan juga pengolahan dan pemasaran hasil petani, sehingga mereka tidak menjadi mangsa tengkulak lagi.

Usaha-usaha pemerintah di atas itu disebut "Catur Sarana" yang harus disediakan bagi petani, yaitu sarana penyuluhan, sarana kredit, sarana produksi dan sarana pengolahan serta pemasaran.

Bila Bimas sudah cukup berhasil di suatu daerah berarti bahwa daerah pertanian bersangkutan sudah akan mampu menyangga keaktifan kerjanya sendiri sebagai produsen padi. Dalam hal ini di daerah bersangkutan kemudian dilaksanakan Intensifikasi (Intensifikasi Massal). Di daerah Intensifikasi ini sarana kredit tidak disediakan lagi, karena petani-petani di situ dinilai sudah cukup mampu berdiri sendiri dalam bidang ini, hanya penyaluran sarana-sarana produksi dijaga kelancarannya.

BUUD dan KUD

Perhasil tidaknya suatu kebijakan pembangunan pertanian amat tergantung dari ada tidaknya aparatur di pedesaan yang mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Dengan kata lain segala usaha pemerintah yang tercakup dalam Bimas harus disangga oleh suatu badan yang bisa mengorganisir kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam hal ini Indonesia sudah mempunyai berbagai pengalaman, sejak Bimas Nasional tahun 1963/64.

Pelaksanaan Bimas Nasional pada waktu itu diserahkan kepada Koperasi Produksi Pertanian Primer (Koperta Primer) yang didirikan di tiap-tiap desa yang dinyatakan sebagai daerah Bimas. Ternyata Koperta Primer sebagai suatu organisasi koperasi yang baru saja didirikan dan diikat dengan target-target tertentu, tidak mampu melaksanakan tugas yang berbagai macam itu. Malahan karena adanya semacam paksaan demi mencapai target, akhirnya Koperta merupakan momok bagi masyarakat di pedesaan. Maka pada musim tanam 1968/69 Pemerintah Indonesia memperkenalkan Bimas Gotong Royong, di mana pelaksanaannya dilakukan secara gotong royong antara Pemerintah dengan swasta, baik swasta asing maupun swasta nasional. Kegiatan "Catur Sarana" di tingkat pedesaan tidak lagi diserahkan kepada Koperta, melainkan kepada kepala desa beserta pembantu-pembantunya.

Bimas Gotong Royong ini juga kurang berhasil, karena paket sarana produksi dan pengembalian kredit yang disama-ratakan seluruh daerah ternyata merupakan beban berat bagi petani. Apalagi dengan pemberian kredit secara kelompok mudah terjadi "penyusutan" kredit dalam perjalanan dari Bank Rakyat Indonesia Unit Desa ke tangan petani dan kerapkali juga terjadi kelambatan

datangnya kredit. Dengan sendirinya hal ini menyebabkan seretnya pengembalian kredit. Berhubung dengan itu maka pada musim tanam 1970/71 sistem Bimas Nasional maupun Bimas Gotong Royong dihentikan dan diganti dengan Bimas yang Disempurnakan, yang sejak musim tanam 1969/70 sudah dicoba di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pilot project. Kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan Bimas-Bimas sebelumnya dicoba diperbaiki. Pelayanan kepada petani keouali ditingkatkan juga diusahakan agar dapat langsung dirasakan oleh petani perorangan. Dengan demikian petani sendiri diikutsertakan bertanggung jawab dalam pembangunan usaha taninya.

Selaras dengan kebijakan pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi harus juga bisa dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat, maka organisasi koperasi perlu dikembangkan kembali. Karenanya diusahakan mengikutsertakan koperasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian. Pada bulan April 1971 dibentuklah BUUD (Badan Usaha Unit Desa). BUUD terutama diserahi untuk melaksanakan penyaluran sarana produksi dan pemasaran serta pengolahan. Dari BUUD ini kemudian diharapkan akan bisa dikembangkan perlahan-lahan menjadi KUD (Koperasi Unit Desa), karena di sementara daerah kata koperasi masih dianggap monok (warisan koperta). Tetapi bagaimana pelaksanaannya?

Pelaksanaan BUUD ternyata pada tahun-tahun pertama tidaklah berjalan seperti yang diidamkan. Masalahnya ialah karena pelaksanaan kebijakan BUUD seperti dipaksakan di seluruh desa di Indonesia, yang dalam kenyataannya mempunyai bermacam ragam kebudayaan dan tradisinya sendiri-sendiri. Seperti di Bali, mereka telah mempunyai "subak", yang pada hakikatnya tidak banyak berbeda dengan BUUD. Masyarakat Bali yang sudah mempunyai tradisi "subak" sulit menerima "paksaan" pelaksanaan BUUD. Jadi kegagalan pada tahun-tahun pertama lebih disebabkan karena pelaksana-pelaksana BUUD kurang mampu beradaptasi dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat petani. Tetapi dengan belajar dari pengalaman-pengalaman itu maka pelaksanaan BUUD kemudian semakin baik dan jumlah BUUD bertambah dengan pesat.

Dengan adanya Bimas/Inmas dan BUUD ini tampak adanya kenaikan hasil padi dengan pesat. Hal ini bisa dilihat dari Tabel berikut (lihat halaman 33).

=====

HASIL PADI INTENSIFIKASI PER HA

Tahun	Rata-rata Bimas	Rata-rata Inmas
1969	38,14 kwintal	36,28 kwintal
1970	44,98 kwintal	41,92 kwintal
1971	44,23 kwintal	39,45 kwintal
1972	49,38 kwintal	43,48 kwintal
1973	51,26 kwintal	45,56 kwintal

Sumber: Buku Repelita II

Jadi dalam jangka waktu 5 tahun (1969-1973) hasil padi di areal Bimas per Ha naik dari 38,14 kwintal sampai 51,26 kwintal dan pada areal Inmas naik dari 36,28 kwintal menjadi 45,56 kwintal. Sedang jumlah rata-rata hasil per Ha sawah intensifikasi dibandingkan dengan yang non-intensifikasi berbanding 2 : 1.

Kebijakan Harga

Tetapi harus dialui bahwa pertambahan produksi padi yang pesat itu tidak hanya disebabkan oleh Bimas/Inmas dan BUUD. Memang dengan itu petani mendapatkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk bertanam padi, tetapi kredit yang diterima petani untuk pengadaan peralatan itu harus dibayar kembali kepada BRI Unit Desa dan petani tidak akan mungkin membayar kreditnya kalau harga gabah atau padi rendah. Untuk itu maka pemerintah melaksanakan kebijaksanaan harga melalui pengaturan Floor and Ceiling Price sejak tahun 1970.

Pada tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi harga beras yang naik turun melonjak-lonjak. Sebagai contoh keadaan pada tahun 1969/1970 (menurut catatan Badan Urusan Logistik) harga beras rata-rata di Jawa pada musim panen (Maret, Juni, Juli) Rp. 20,56 per kg, sedang pada musim paoeklik (Desember, Januari, Februari) melonjak menjadi Rp. 50,26 per kg (naik 76%). Dengan demikian berarti petani menjual berasnya dengan murah kepada tengkulak pada musim panen dan terpaksa membelinya kembali dengan mahal pada musim paoeklik.

Pelaksanaan kebijakan harga dasar didasarkan pada
Rumus Candi:

$$P = \frac{1 \frac{1}{2} a.b}{2}$$

dengan asumsi:

harga pupuk urea dibanding harga padi kering giling = 1 : 1
konversi padi kering giling dibanding beras giling = 2 : 1

Keterangan: P : harga padi kering giling

a : harga urea c & f dalam US\$

b : BE rate pada saat itu

$\frac{1}{2}$: perbandingan biaya distribusi pupuk dari
pelabuhan sampai ke tangan petani

Dengan rumusan itu pada tahun 1970 ditetapkan

harga pupuk subsidi	Rp. 26,60 per kg
harga dasar padi kering giling	Rp. 13,20 per kg
harga beras kwalitas IB tanpa karung	Rp. 36,-- per kg

Harga dasar ini berhasil dipertahankan selama 3 tahun (sampai 1972). Tetapi pada tahun 1972 karena terjadi musim kemarau yang panjang, produksi beras nasional turun 3,1% dan harga beras tidak dapat dikuasai lagi. Untuk dapat tetap merangsang petani, maka harga dasar padi kering giling dinaikkan menjadi Rp. 15,- per kg kemudian pada bulan Maret 1973 dinaikkan lagi menjadi Rp. 17,50 dan pada bulan Mei 1973 kembali dinaikkan menjadi Rp. 21,20.

Pada tahun 1973 itu keadaan mulai membaik kembali, hingga harga dasar bisa tetap dipertahankan. Tahun 1974 karena laju inflasi mencapai 47% (antara April 1973 - Maret 1974) maka harga dasar dinaikkan lagi menjadi Rp. 30,- per kg untuk padi kering giling.

Dalam sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional tanggal 19 Nopember 1974 diputuskan kebijakan baru terutama berkenaan dengan subsidi pupuk. Sampai saat itu pupuk didukung oleh subsidi pemerintah, beban itu makin terasa berat. Karena itu sedikit demi sedikit subsidi pupuk dikurangi dan mulai tanggal 20 Nopember 1974 harga pupuk dinaikkan 50%. Tetapi supaya petani tidak terlalu dirugikan, mulai tanggal 1 Februari 1975 (permulaan panen) harga dasar padi kering giling juga dinaikkan menjadi Rp. 31,30 per kg. Paket kredit Bimas dengan sendirinya juga dinaikkan.

Dalam dua minggu pertama dengan adanya kebijakan baru ini terasa harga beras melonjak, tetapi kemudian bisa dikendalikan lagi. Masalah yang sekarang dihadapi adalah justru bahwa di beberapa daerah harga padi berada di bawah harga dasar.

Prospek

Kalau dilihat angka-angka jumlah produksi beras per tahun sejak Repelita I tampak bahwa produksi beras mengalami kemajuan dengan peningkatan produksi rata-rata sekitar 4,4% - 7,2% setiap tahunnya.

Tabel :	1968	:	11.666.000 ton
	1969	:	12.249.000 ton
	1970	:	13.140.000 ton
	1971	:	13.724.000 ton
	1972	:	13.183.000 ton
	1973	:	14.607.000 ton
	1974	:	15.452.000 ton

Sumber : Buku Repelita II

Menurut perkiraan, bila tidak terjadi bencana alam, seperti banjir serta serangan hama besar-besaran, maka hasil produksi beras untuk tahun 1975 akan mencapai 15.633.000 ton dan pada tahun 1976 sebesar 16.333.000 ton. Direncanakan pada tahun 1978/79 Indonesia akan bisa mencukupi kebutuhan berasnya sendiri yaitu sekitar 19 juta ton.

Prospek yang cerah ini didasarkan pada perhitungan kenaikan rata-rata sekitar 4,4% setahun. Kecuali itu ada beberapa faktor lainnya yang mendukung: Pertama, dibangunnya rangkaian waduk-waduk dan irigasi baru di daerah-daerah pertanian padi. Kedua, dimulainya pengorjaan sawah pasang surut, yang tentu akan menambah luasnya areal padi paling sedikit 100.000 Ha. Ketiga, dimulainya pilot project Rice Estate di Sumatra Selatan, meskipun masih dalam ukuran kecil tetapi akan bisa menambah produksi juga. Keempat, ditemukannya Benih-benih Unggul yang anti hama wereng seperti PB 20. Dengan faktor-faktor di atas maka bukanlah merupakan kerustahilan bahwa Indonesia akan sanggup memenuhi kebutuhan padinya sendiri di tahun 1979.

